

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG PPDIP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Iin Indriyani¹, Anti Wulan Agustini²

iin13indriyani@gmail.com¹, antyagustini@gmail.com²

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan penjadwalan produksi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi pada PT. Nikomas Gemilang. Penjadwalan produksi memiliki peranan penting dalam menentukan urutan pekerjaan, mengalokasikan sumber daya produksi, serta memastikan bahwa kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan observasi, pengumpulan data, serta diskusi dengan pihak terkait di lingkungan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjadwalan produksi yang diterapkan telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan penyediaan bahan baku, perubahan permintaan produksi, serta ketidakseimbangan beban kerja pada beberapa bagian produksi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan, serta pengawasan produksi agar sistem penjadwalan produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. **Kata Kunci:** Penjadwalan Produksi, Evaluasi Produksi, Efisiensi Produksi, Industri Manufaktur.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of production scheduling to improve the effectiveness and efficiency of the production process at PT. Nikomas Gemilang. Production scheduling plays an important role in determining the sequence of work, allocating production resources, and ensuring that production activities run according to the established plan. The method used in this study is a descriptive approach through observation, data collection, and discussions with related parties in the production environment. The results show that the production scheduling system implemented in the company has generally been carried out properly, but several obstacles are still encountered, such as delays in the availability of raw materials, changes in production demand, and imbalances in workload across several production sections. These conditions can affect the smoothness of the production process and the achievement of production targets. Therefore, improvements in coordination, planning, and supervision are needed to support a more effective and efficient production scheduling system.

Keywords: Production Scheduling, Production Evaluation, Production Efficiency, Manufacturing Industry.

PENDAHULUAN

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan, termasuk layanan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah

(Dwiyanto, A, 2006). Selain itu, (Mardiasmo, 2002), menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan serta aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pelayanan informasi publik di instansi pemerintah biasanya dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas untuk mengelola serta menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Keberadaan PPID sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik karena lembaga tersebut berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal penyediaan informasi. Menurut (Kumorotomo, W, 2005), keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan.

Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan serta program pemerintah sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Pengelolaan Pelayanan

Data dan Informasi Publik (PPDIP) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan informasi publik di bidang PPDIP pada Dinas Sosial Provinsi Banten menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan program-program sosial. Melalui pelayanan informasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang sosial.

Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelayanan informasi publik di bidang PPDIP pada Dinas Sosial Provinsi Banten serta mendorong terciptanya pelayanan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini ialah dengan menggunakan diskusi partisipatif, dan tanya jawab. Metode penyuluhan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi mengenai pentingnya pelayanan informasi publik serta peran bidang Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPDIP) dalam meningkatkan transparansi pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Melalui penyuluhan ini diharapkan peserta dapat memahami hak masyarakat dalam memperoleh informasi serta pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut (Mardikanto, T. , 2010), menyatakan bahwaannya penyuluhan

merupakan proses pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu memahami serta memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penyuluhan menjadi salah satu metode yang efektif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena dapat memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan pengabdian juga menggunakan metode diskusi partisipatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, serta permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

Dengan melalui diskusi tersebut diharapkan terjadi komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan peserta sehingga pemahaman mengenai pelayanan informasi publik dapat meningkat. Menurut (Dwiyanto, A, 2006), dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Dengan adanya metode tanya jawab juga digunakan dalam kegiatan pengabdian ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Dengan adanya sesi tanya jawab, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelayanan informasi publik serta peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sinambela, L. P, 2011). Oleh karena itu, kualitas pelayanan informasi publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses. Selain itu, (Sedarmayanti, 2012)., menyatakan bahwa transparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan dan program pemerintah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan menggunakan metode penyuluhan, diskusi partisipatif, dan tanya jawab tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pelayanan informasi publik serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan terkait pelayanan informasi publik di bidang Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPDIP) pada Dinas Sosial Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi partisipatif, serta tanya jawab yang melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memahami secara optimal mengenai mekanisme pelayanan informasi publik yang tersedia di instansi pemerintah.

Setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh informasi dari instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, transparansi informasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diterapkan oleh pemerintah.

Menurut (Hardiyansyah, 2011), menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang baik harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan, termasuk layanan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Menurut (Nugroho, R, 2003), keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Hasil kegiatan pengabdian juga menunjukkan bahwa keberadaan bidang Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPDIP) memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan melalui pelayanan informasi publik yang baik, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan program bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, serta kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial.

Menurut (Moenir, H. A. S., 2006), dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas harus mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan melalui pelayanan yang cepat, tepat, serta mudah diakses. Dalam konteks pelayanan informasi publik, pemerintah perlu menyediakan sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, dengan melakukan kegiatan diskusi yang dilakukan selama pengabdian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur permintaan informasi serta keterbatasan akses informasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi di instansi pemerintah.

Menurut (Ratminto, & Winarsih, A. S, 2005), peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya upaya tersebut, pelayanan publik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai pelayanan informasi publik sangat penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterbukaan informasi serta peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai suatu permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh informasi publik serta memberikan masukan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi di instansi pemerintah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di bidang PPDIP pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan mengenai pelayanan informasi publik di bidang Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPDIP) pada Dinas Sosial Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan meelalui pelayanan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang sosial. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai pelayanan informasi publik mengalami peningkatan. Peserta kegiatan menjadi lebih memahami pentingnya keterbukaan informasi serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari instansi pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh bidang PPDIP pada Dinas Sosial Provinsi Banten diharapkan dapat terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih baik sehingga mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T. (2010). *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Moenir, H. A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.